



MODUL EKONOMI PEMBANGUNAN

***PERMASALAHAN JANGKA PENDEK
DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA***

**DOSEN:
Posma Sariguna Johnson Kennedy**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
SEMESTER GANJIL 2019/2020
Jakarta Agustus 2019**

1

PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian Indonesia saat ini yang masih memburuk yang semakin hari semakin banyak kemiskinan dimana-mana karena dunia kerja yang lesu dan banyaknya bencana alam yang menimpa bangsa Indonesia. Itu membuat kehidupan semakin terpuruk dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan banyak angkatan kerja yang tidak mendapat kesempatan dalam dunia kerja. Maka pemerintah melakukan gerakan ekonomi pada semua sektor perdagangan dan peningkatan infrastruktur guna menunjang perekonomian berpihak kepada rakyat. Karena dengan mencipta rakyat kecil. kan lapangan kerja sendiri akan tercapai kehidupan yang lebih baik (Solopos, 2006). Krisis ekonomi dan moneter yang bermula pada tahun 1997 mengakibatkan dampak negatif yang cukup luas di dalam perekonomian Indonesia. Perbankan nasional kita juga terkena dampaknya. Banyak bank mengalami penutupan karena tidak kuat menanggung negative spread dan non randoming loan yang tinggi, sehingga dari jumlah sekitar 300-an bank yang ada sebelum krisis sekarang tinggal menyisakan 150-an bank. Masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, adalah dua masalah yang harus segera diatasi guna terwujudnya tujuan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan tersebut tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan, yaitu bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial, maka pelaksanaan pembangunan perlu lebih ditingkatkan dan diperluas, terutama pembangunan untuk lebih mendorong tercapainya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan masyarakat yang seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah saja, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara keduanya, juga pembangunan yang merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk golongan saja atau sebagian masyarakat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan. Penelitian tentang perilaku konsumen nampaknya tidak akan pernah mengalami kekeringan ide yang terus berkembang dan semakin menarik. Perilaku konsumen mencakup semua aktivitas pembeli, mantan pembeli dan pembeli potensial, dari pra-beli sampai pasca beli, dari memulai mengkonsumsi sampai berhenti mengkonsumsi. Hal ini mengalami perkembangan yang melebar dari kesadaran akan suatu keinginan, yaitu melalui pencarian dan evaluasi alat pemuas kebutuhan yang paling mungkin, serta tindakan pembelian itu sendiri, sampai evaluasi penggunaan produk yang dibeli, yang secara langsung berdampak pada kemungkinan dilakukannya pembelian ulang.

Teori-teori mulai muncul untuk mencoba mengidentifikasi masalah ekonomi apakah yang sebenarnya yang dihadapi manusia di muka bumi ini. Secara umum ada dua buah teori umum yang mencoba untuk menjelaskan permasalahan yang ada dalam ekonomi, yaitu pokok masalah ekonomi secara klasik dan modern.

Pokok masalah ekonomi klasik merupakan bahasan teori ekonomi klasik. Teori ini berdasarkan pemikiran Adam Smith, David Ricardo, dan John Stuart Mill yang mendominasi pemikiran ekonomi sampai tahun 1870-an. Teori ekonomi klasik melihat pentingnya masalah ekonomi sebagai kesatuan dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi untuk kesejahteraan (kemakmuran), dalam hal ini amat menekankan kekuatan pasar sehingga menolak campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.

1. Masalah ekonomi klasik adalah ekonomi yang dilihat dari sudut pandang sederhana. Pada dasarnya pemikiran ini bertujuan pada satu hal, yaitu kemakmuran. Pemecahan masalah ini adalah dengan melakukan apapun yang dianggap perlu agar kemakmuran dapat dicapai. Yang disebut sebagai kemakmuran adalah situasi dimana semua barang dan jasa yang dibutuhkan manusia telah tersedia. Apabila dirincikan masalah ekonomi klasik dilihat dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi a. Masalah Produksi

Permasalahan produksi adalah permasalahan bagaimana memproduksi semua benda (barang dan jasa) yang dibutuhkan masyarakat banyak.

- b. Masalah distribusi

Masalah distribusi terletak pada bagaimana supaya benda-benda pemenuh kebutuhan bisa sampai ke tangan konsumen yang membutuhkannya. Seperti yang telah diketahui, barang dan jasa yang tidak sampai ke tangan konsumen yang tepat, tidak ada nilai gunanya, dan tidak dapat memuaskan kebutuhan.

- c. Masalah Konsumsi

Masalah konsumsi menyangkut masalah apakah benda pemenuh kebutuhan yang diproduksi memang benda yang dapat dimiliki oleh konsumen. Barang yang diproduksi haruslah barang yang tepat, yaitu barang yang memang dibutuhkan, diinginkan, dan mampu dibeli oleh konsumen.

2. Pokok permasalahan ekonomi modern terkandung dalam dua kata kunci, kelangkaan dan pilihan. Yang pertama menjadi penyebab yang kedua sehingga muncul empat pertanyaan mendasar tentang *what, how, who, dan for whom* tersebut. Walaupun setiap masyarakat menghadapi pertanyaan yang sama, namun cara mengatasinya berbeda. Perbedaan cara inilah yang melahirkan sejumlah sistem ekonomi.

Kita dapat mendefinisikan empat masalah fundamental perekonomian yang dihadapi setiap masyarakat di era modern. a. Apa (*What*)

Barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi dan dalam jumlah berapa, harus ditentukan. Dari sekian banyak barang dan jasa, manakah yang harus dipilih untuk

diproduksi!. Keputusan produksi tidak lagi hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan, namun juga untuk menghasilkan keuntungan maksimum.

b. Bagaimana (*How*)

Dengan cara bagaimana proses produksi akan dilakukan? Apakah akan mendatangkan keuntungan yang besar? Apabila terdapat barang modal berupa bangunan apakah akan dijadikan kantor atau gudang? Bila terdapat sebidang tanah apakah akan digunakan? Ditanami padi, jagung, atau tebu?. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus dijawab dengan bijaksana. Salah melakukan produksi akan berakibat pada kerugian, Kelebihan atau kekurangan produksi juga dapat menimbulkan kerugian, karena aktivitas produksi membutuhkan biaya. Dengan cara bagaimana (*who*) proses produksi akan dilakukan? Maksudnya adalah siapa yang akan melaksanakan, menggunakan sumber daya apa saja, dengan teknologi apa barang-barang tersebut dihasilkan, dan seberapa besar skala produksinya. Hal ini dibutuhkan dalam rangka penyesuaian perkembangan zaman.

Beberapa faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan ini yaitu: –

Pilihan kombinasi sumber daya yang digunakan

- Perencanaan proses produksi untuk mendapatkan keuntungan
- Penentuan teknologi yang digunakan
- Pertimbangan faktor eksternal: harga, perekonomian, suku bunga, biaya produksi, inflasi, valuta asing dan lain-lain.

c. Siapa pelaku Produksi (*Who*)

Di zaman modern, banyak pihak yang bisa melakukan produksi seperti, pemerintah, swasta, atau koperasi. Inilah salah satu modernisasi, yaitu spesialisasi. Spesialisasi berarti setiap pihak memiliki keterampilan dan keahlian khusus yang tidak dimiliki pihak lain. Pertimbangan mengenai pelaku produksi merupakan hal yang penting karena setiap pihak memiliki kelebihan untuk memproduksi lebih baik.

d. Untuk siapa (*For Whom*)

Untuk siapa (*for whom*) barang di produksi apakah untuk segmen pasar tertentu, atau masyarakat umum!

Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah China dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G-20. Setelah mengalami gejolak politik dan sosial yang hebat pada pertengahan 1960 an di bawah Presiden Soekarno, Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto segera melakukan restrukturisasi tata kelola fiskal yang tercerai berai akibat berbagai kebijakan ekonomi yang memberatkan perimbangan neraca APBN yang ada dengan

berbagai cara, dari mengadakan renegotiasi terkait pembayaran utang jatuh tempo hingga meminta IMF untuk mengasistensi pengelolaan fiskal Indonesia yang masih rapuh.

Selama 2 dekade Indonesia membangkitkan kembali ekonomi, ekonomi Indonesia yang ditopang dari kegiatan industri dan perdagangan berbasis ekspor menggerakkan ekonomi Indonesia masuk sebagai salah satu *The East Asia Miracle* pada tahun 1990 an, di mana Indonesia mampu menciptakan stabilitas politik, sosial dan pertahanan-keamanan yang menjadi fondasi ekonomi yang kuat untuk menghasilkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ditopang dari sektor industri manufaktur berbasis ekspor dan industri pengolahan sumber daya alam.

Alhasil, ekonomi Indonesia menjadi salah satu ekonomi yang terindustrialisasi seperti Jepang, Korea Selatan dan Thailand. Meski Indonesia berhasil mencapai stabilitas politik sosial pertahanan dan keamanan dan industri manufaktur dan pengolahan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, ternyata keberadaan infrastruktur transportasi seperti jalan tol, pelabuhan, kereta api dan bandara yang ada di Indonesia tidak mampu mengejar pertumbuhan kebutuhan pasar yang ada dan perlahan, hal ini mengakibatkan munculnya kesenjangan ekonomi di antara Pulau Jawa dan Pulau di luar Jawa akibat minimnya pembangunan infrastruktur transportasi di luar pulau Jawa, mengakibatkan terjadi maraknya urbanisasi massal warga luar Pulau Jawa yang menuju Pulau Jawa memunculkan kesimpulan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya diperuntukkan untuk Pulau Jawa sendiri. Tidak hanya itu saja, pengelolaan fiskal APBN yang mulai menunjukkan perimbangan neraca yang tidak sehat dan penegakan regulasi dan pengawasan kegiatan sektor finansial yang lemah karena minimnya kecakapan instansi untuk mengatur kegiatan sektor jasa keuangan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan pinjaman tidak bergerak (*non-performing loan*) yang tidak terkendali, hal ini tidak lepas juga dari peran regulator finansial yang gagal untuk menegakkan peraturan untuk memberikan pertanggungjawaban sosial perusahaan berupa edukasi keuangan kepada rakyat.

Hal tersebut mencapai titik klimaksnya ketika Krisis moneter 1998 merebak ke berbagai negara di Asia, ketika jaring pengaman sistem keuangan gagal menahan epidemi krisis moneter tersebut masuk ke Indonesia, maka merebaklah krisis tersebut kesemua sektor perekonomian dan menjangkiti industri keuangan Indonesia yang akhirnya menjadi awal kejatuhan ekonomi dan segala pencapaian yang Indonesia raih yang diawali dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja massal yang berakhir dengan berbagai kerusuhan yang menuntut mundurnya Soeharto sebagai Presiden Indonesia, membuat Indonesia mau tidak mau harus meminta IMF untuk mengajukan pinjaman untuk melakukan normalisasi ekonomi Indonesia yang sudah sakit akibat harus menanggung biaya yang sangat berat akibat kegagalan jaringan sistem pengamanan keuangan Indonesia saat itu untuk mendeteksi adanya kejatuhan sistem keuangan secara sistemik dan mengantisipasi terjadinya peningkatan beban yang luar biasa, hal ini tidak lepas dari ketidakmampuan rezim Soeharto yang tidak mampu menciptakan ekonomi yang berpondasi kuat

untuk mengantisipasi dan menghadapi bahaya ekonomi, ditambah lagi dengan kurang cakupannya pejabat dan sistem yang terkait untuk mengantisipasi adanya krisis moneter tersebut. Sejarah Ekonomi Indonesia dimulai sejak orde baru pada pemerintahan Soeharto sejak tahun 1966 – 1997.

Dimana Seiring dengan munculnya berbagai demonstrasi di kalangan masyarakat untuk menuntut Presiden Soekarno untuk mundur dari jabatan yang dipegangnya selama lebih dari 20 tahun akibat gejolak politik dan ekonomi yang berujung pada kemiskinan masyarakat menjadi peringatan keras bagi Soekarno untuk mundur dari tampuk kepemimpinan sebagai Presiden. Soekarno yang terdesak akibat berbagai demonstrasi tersebut, memutuskan untuk memulai transisi kepemimpinan pemerintahan dengan menunjuk Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret sebagai landasan hukum untuk mengizinkan Soeharto sebagai penjabat Presiden untuk segera menyusun transisi ekonomi Indonesia yang sudah terseok-seok akibat berbagai kebijakan politik yang hedonistik. Utang luar negeri menggunggung, defisit melebar tidak terkendali dan inflasi mencapai ratusan persen serta kemiskinan di mana-mana hingga keamanan yang tidak kondusif menjadi permasalahan utama yang harus diselesaikan oleh Soeharto yang baru saja menjabat sebagai Presiden. Dalam bidang ekonomi, Presiden Soeharto mengajukan RUU penanaman modal yang kemudian disahkan oleh DPR RI menjadi UU no 1 Tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia berupa investasi di berbagai sektor usaha industri dan jasa, sekaligus sebagai upaya mengembalikan kepercayaan internasional terhadap stabilitas dan kondusivitas ekonomi, politik dan sosial serta keamanan Indonesia di mata dunia. Tercatat, sejak undang-undang ini disahkan, jumlah modal yang telah ditanamkan di Indonesia telah mencapai lebih dari US\$ 9 Miliar dari 30 negara.

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita \$70 menjadi lebih dari \$1.000 pada 1996.

Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing. Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997, menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Longgarnya kebijakan pemerintah dan institusi jasa keuangan saat itu dan meningkatnya nilai ekspor barang non-migas, membuat banyak jasa keuangan berupa bank, asuransi dan berbagai lembaga keuangan lainnya muncul dengan tujuan mendapat keuntungan dari fasilitasi ekspor, namun dengan modal inti yang sering kali kurang.

Tanpa disadari oleh pemerintah dan institusi keuangan sendiri, besarnya kesempatan untuk membiayai fasilitasi ekspor tersebut, perlahan-lahan mulai menunjukkan bahwa pertumbuhan jasa keuangan tidak berkualitas, mulai memakan korban berupa tutupnya beberapa bank secara berantai akibat gagal menarik kredit yang macet, hingga modal inti yang kurang mulai menandai gelapnya perkembangan jasa keuangan yang saat itu tengah tumbuh pesat. Belum lagi dengan sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor menjadi bom waktu yang akan mewarnai kejatuhan ekonomi nasional.

Hal ini mencapai puncaknya ketika Krisis finansial terjadi di Asia dan merembet hingga ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Dengan defisit anggaran yang sudah mencapai lebih dari 60% dari PDB nasional, ditambah dengan rasio NPL (kredit macet) yang sudah mencapai 20% lebih membuat pemerintah dan institusi pengawasan kegiatan keuangan hanya bisa memperlambat dan mengurangi parahnya krisis tersebut dengan menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai membebani anggaran negara dan berpotensi melebarkan defisit anggaran, berupa penutupan program pesawat nasional, permobilan nasional hingga subsidi ekspor komoditas. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.

Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan melebihi Rp 6300 Trilyun meningkat lebih dari 100 kali lipat dibanding PDB tahun 1980. Setelah India dan China, Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat di antara 20 negara anggota Industri ekonomi terbesar didunia G20.

Ini adalah tabel PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia dari tahun ke tahun oleh IMF dalam juta rupiah. Sejak krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam. Saat ini, satu

dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi di mana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui "perubahan besar" desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak. Keputusan tersebut memberikan US\$10 miliar tambahan untuk pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US\$5 miliar telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US\$15 miliar ekstra untuk dibelanjakan pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami 'ruang fiskal' yang demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 1970-an. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati-hati dan tepat. Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US\$ 10 miliar dari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total. Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah provinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD. Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya

dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya. Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001 - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih di bawah 1.0 persen dari PDB. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 , menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.

Pemerintah adalah ibarat seorang nahkoda yang sedang menjalankan sebuah kapal. Di dalam jangka pendek ia harus dapat menjaga kondisi kapalnya akan terhindar dari berbagai ancaman selama perjalanan. Sedangkan di dalam jangka panjang, nahkoda tersebut harus berusaha agar kapalnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan / dicita-citakan. Tentu saja dalam kenyataannya perjalanan kapal yang dinahkodainya tidak semulus yang direncanakan, banyak sekali rintangan dan masalah yang selalu mengintai dan harus siap dipecahkan begitu muncul menghadangnya. Di dalam jangka panjang pemerintah harus menghantarkan masyarakat indonesia kepada kemakmuran, kesejahteraan lahir dan batin serta harus menghadapi masalah jangka panjang seperti masalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan di dalam jangka pendek pemerintah dituntut untuk selaludapat membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif / mendukung semua pihak. Sedangkan dipihak lain masih harus menghadapi masalah-masalah ekonomi jangka pendek yang terkenal dengan istilah “tiga penyakit pokok ekonomi”. Dan sesungguhnya keberhasilan pemerintah dalam jangka panjang tidak terlepas dari kemampuannya menangani masalah-masalah ekonomi jangka pendek ini.

A. PENGANGGURAN

Meskipun banyak jenis pengangguran yang muncul dalam perekonomian indonesia, namun secara umum pengangguran akan lebih banyak memberi dampak yang kurang baik bagi kegiatan ekonomi negara. Pengangguran akan menyebabkan perekonomian berada kondisi dibawah kapasitas penuh, suatu kapasitas yang dihaparkan. Pengangguran juga akan menyebabkan beban angkatan kerja yang benar-benar produktif menjadi semakin berat, disamping secara sosial pengangguran akan menimbulkan kecenderungan masalah-masalah kriminalitas dan masalah sosial lainnya.

Dari seluruh penduduk Indonesia, kita bagi dalam penduduk usia kerja (PUK), yakni penduduk yang memiliki usia ‘pantas’ kerja yakni antara 15 tahun sampai 65 tahun.

Meskipun pada kenyataannya, seperti negara berkembang lainnya, penduduk dengan usia di bawah 10 tahunpun telah bekerja. Sedangkan secara umum penduduk diluar usia kerja tersebut dinamakan penduduk diluar usia kerja (PUK), yakni para ballita dan manula. Dari PUK masih dibagi angkatan kerja (AK) dan bukan angkatan kerja (BAK). AK adalah mereka yang memiliki usia kerja yang seharusnya sedang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan BAK adalah mereka yang secara usia berada dalam kelompok usia kerja, namun karena keadaan dan kondisi tertentu yang membuat mereka belum mendapat bekerja, yakni para pelajar, ibu rumah tangga, dan mereka yang menderita cacat. Kelompok AK selanjutnya dibagi menjadi kelompok yang bekerja (B) dan tidak bekerja (TB). Kelompok TB inilah yang benar-benar merupakan pengangguran, karena mereka berada dalam usia kerja, dan mereka tidak mencari ilmu, tidak juga seorang ibu rumah tangga, maupun cacat namun tidak tersedia bekerja. Inilah yang kemudian menjadi beban masyarakat. Sedangkan kelompok kerja adalah angkatan kerja yang benar-benar bekerja dan dibagi dalam bekerja penuh (BP) dan setengah bekerja (SB). Yang dimaksud dengan bekerja penuh adalah angkatan kerja yang memiliki jam kerja standar (7-8 jam kerja sehari). Sedangkan setengah bekerja adalah angkatan kerja yang hanya bekerja kurang dari jam kerja standar. Mungkin disebabkan sistem kerja shift yang diterapkan oleh perusahaan. Setengah bekerja ini sendiri masih dibagi menjadi setengah bekerja kelihatan dan setengah bekerja yang tidak kelihatan.

Adapun jenis-jenis pengangguran yang dapat disebutkan diantaranya adalah :

1. Pengangguran Friksionil, yakni pengangguran yang terjadi karena seseorang memilih menganggur sambil menunggu pekerjaan yang lebih baik, yang memberikan fasilitas dan keadaan yang lebih baik.
2. Pengangguran Struktural, yakni pengangguran yang terjadi karena seseorang diberhentikan oleh perusahaan, karena kondisi perusahaan yang sedang mengalami kemunduran usaha, sehingga terpaksa mengurangi tenaga kerja.
3. Pengangguran teknologi, adalah pengangguran yang terjadi karena mulai digunakannya teknologi yang menggantikan tenaga manusia.
4. Pengangguran Siklikal, yakni pengangguran yang terjadi karena terjadinya pengurangan tenaga kerja yang secara menyeluruh, dikarenakan kemunduran dan resesi ekonomi.
5. Pengangguran Musiman, yakni pengangguran yang terjadinya dipengaruhi oleh musim. Jenis pengangguran ini sering terjadi pada sektor pertanian.
6. Pengangguran Tidak Kentara, yakni pengangguran yang secara fisik dan sepiantas tidak kelihatan, namun secara ekonomi dapat dibuktikan bahwa seseorang tersebut sesungguhnya menganggur.

7. Ada beberapa rasio yang berkaitan dengan pengangguran tersebut. Rasio-rasio tersebut diantaranya adalah :
 - a. Dependency ratio, rasio ini menggambarkan seberapa besar beban secara ekonomi yang sebenarnya ditanggung oleh penduduk usia kerja terhadap penduduk diluar usia kerja.
 - b. Tingkat partisipasi angkatan kerja, adalah rasio yang mengukur seberapa besar dari penduduk yang berada dalam usia kerja yang benar-benar merupakan angkatan kerja.
8. Beberapa langkah dan kebijaksanaan pemerintah yang pernah sedang dan akan dilakukan diantaranya :
 - a. Yang paling mendasar adalah dengan mengatasi masalah kependudukan yakni dengan mencoba mengendalikan pertumbuhan penduduk, karena disadari bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat akan memicu munculnya pengangguran dimasa datang, jika tidak diimbangi dengan peningkatann kegiatan produksi.
 - b. Dengan tidak melupakan prinsip APBN, akan menambah sektor pengeluaran, baik itu pengeluaran pemerintah maupun pengeluaran dari sektor investasi swasta guna mendukung terciptaya peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat membuka peluang dan kesempatan kerja yang lebih banyak.
 - c. Di pihak lain dengan memberikan dan mengarahkan pendidikan sumber daya ke arah yang lebih mendesak, dengan memperbanyak pusat-pusat pelatihan kerja, serta dengan memberi kemudahan bagi pengelolaan sekolahsekolah kejurusan.
 - d. Tidak lupa di sektor luar negeri, mulai digalakkannya ekspor jasa berupa tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri meskipun untuk langkah terakhir ini masih memerlukan usaha yang lebih keras dari semua pihak, agar kepentingan dan nasib pekerja yang bekerja diluar negeri lebih baik.

B. INFLASI

Banyak sudah komentar, pendapat, dan pandangan mengenai apa yang disebut dengan inflasi. Jika didengarkan secara sepintas tampaknya komentar-komentar tersebut lebih mengarah pada suatu kesimpulan bahwa inflasi tersebut berbahaya, inflasi itu sesuatu yang buruk bagi perekonomian. Tidak jarang pula inflasi harus menerima tuduhan sebagai penyebab gagalnya berbagai kegiatan ekonomi suatu negara.

Beberapa poin penting mengenai inflasi, bahwa inflasi ini terjadi :

1. Di warnai kenaikan harga-harga komoditi secara umum, atau dapat dikatakan hampir setiap komoditi mengalami kenaikan.

2. Dapat diketahui dan dihitung jika telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu. Di Indonesia sendiri digunakan waktu sebulan atau setahun dalam mengetahui terjadinya dan besarnya inflasi yang terjadi. Dengan demikian jika kenaikan harga tidak menyeluruh atau jika menyeluruh namun hanya terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat dan dalam wilayah tertentu yang terbatas, maka istilah inflasi menjadi agak kurang tepat disebutkan. Banyak ahli ekonomi kemudian mengulas dan kemudian membagi inflasi ini menjadi beberapa pengertian menurut beberapa sudut pandang.

Perekonomian Indonesia sendiri pernah mengalami keempat istilah tersebut. Jika dilihat dari sebab-sebab kemunculannya dibagi dalam :

1. Inflasi karena naiknya permintaan
Inflasi karena naiknya permintaan yakni inflasi yang terjadi karena adanya gejala naiknya permintaan secara umum, sehingga sesuai dengan hukum permintaan maka harga pun secara umum akan cenderung naik.
2. Inflasi yang terjadi karena naiknya biaya produksi
Inflasi yang kedua ini terjadi jika kecenderungan naiknya harga lebih diakibatkan karena naiknya biaya produksi, seperti naiknya upah tenaga kerja, naiknya harga bahan baku dan penolong, dan sejenisnya. Jika ini yang terjadi akibatnya adalah lebih buruk dari inflasi yang disebabkan karena naiknya permintaan masyarakat.
3. Inflasi yang berasal dari dalam negeri
Yang dimaksud dengan inflasi dari dalam negeri adalah inflasi yang terjadi dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam negeri seperti misalnya peredaran uang di dalam negeri yang terlalu banyak. Peredaran uang yang banyak akan menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada uang menjadi berkurang (karena mendapatkan uang relatif mudah), dengan kata lain jumlah uang yang beredar lebih banyak dari yang dibutuhkan.
4. Inflasi yang berasal dari luar negeri
Inflasi yang terjadi di negara lain sering kali merembet ke negara Indonesia. Proses terjadinya diawali dengan masuknya komoditi import yang telah terkena inflasi (harga naik) di negara asalnya. Sehingga komoditi impor tersebut kita beli dengan harga yang mahal pula. Jika kemudian komoditi tersebut kita olah sebagai bahan baku untuk sebuah produk, maka tentu harga produk tersebut akan menjadi mahal. Dengan demikian semakin banyak kita mengimpor komoditi-komoditi yang telah terkena inflasi di negara asalnya, maka semakin terbuka kemungkinan terjadinya inflasi di Indonesia.

Jika kita perhatikan, maka inflasi memang akan membawa dampak yang kurang baik bagi beberapa aspek kegiatan ekonomi masyarakat, diantaranya :

1. Pertama, inflasi akan menjadikan turunnya pendapatan riil masyarakat yang memiliki penghasilan (kenaikkan pendapatannya) dengan kenaikan harga yang disebabkan karena inflasi. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki penghasilan yang dinamis (pedagang atau pengusaha) justru biasanya akan mendapatkan manfaat dari adanya kenaikan harga tersebut, dengan cara menyesuaikan harga jual produk yang dijualnya. Dengan demikian pendapatan yang mereka peroleh pun secara otomatis akan menyesuaikan, dan tidak jarang dengan prosentase yang lebih besar.
2. Kedua, inflasi menyebabkan turunnya nilai riil kekayaan masyarakat yang berbentuk kas, karena nilai tukar kas (uang misalnya) tersebut akan menjadi kecil, karena secara nominal harus menghadapi harga komoditi per satuan yang lebih besar.
3. Ketiga, inflasi akan menyebabkan nilai tabungan masyarakat menjadi turun, sehingga orang akan cenderung memilih menginvestasikan uangnya dalam aktiva yang lebih baik, daripada menabungkannya ke bank. Dengan gejala ini, tentulah akan mengoyahkan dunia perbankan sebagai salah satu sumber perolehan dana yang cukup penting di Indonesia.
4. Keempat, inflasi akan menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi terhambat, sebagai contoh, dari sektor perdagangan luar negeri, maka komoditi ekspor Indonesia menjadi tidak dapat lagi bersaing dengan komoditi sejenis di pasar dunia. Dari sektor kurs valuta asing sendiri, maka akan menyebabkan nilai rupiah mengalami depresiasi/ penurunan nilai. Akibatnya nilai hutang luar negeri Indonesia menjadi membengkak. Dan masih banyak akibat-akibat kurang baik dari adanya inflasi.

Meskipun banyak orang lebih melihat inflasi sebagai suatu yang merugikan, namun ada beberapa sisi positif dari adanya inflasi ini, yakni :

1. Inflasi yang terkendali menggambarkan adanya aktivitas ekonomi dalam suatu negara
2. Inflasi terkendali merangsang masyarakat untuk terus berusaha bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraannya, agar tetap dapat mengikuti penurunan nilai riil pendapatannya.

Indonesia merupakan negara yang terletak di daerah asia tenggara, dimana indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia. Namun demikian indonesia masih merupakan negara yang berkembang. Lantas yang menjadi pertanyaan disini adalah konsep atau sistem ekonomi apakah yang sesuai untuk diterapkan di indonesia.?

Sebelum mengetahui sistem ekonomi yang diterapkan di indonesia, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu cara yang

digunakan untuk mengatur segala aktivitas perekonomian dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta dalam rangka mencapai kemakmuran serta kesejahteraan bersama. Suatu sistem ekonomi tidaklah berdiri sendiri, sistem ekonomi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat di suatu daerahnya. Oleh karena itu tidak heran jika dalam penerapan sistem ekonomi disuatu negara terjadi benturan, konflik, atau bahkan pertentangan. Dengan demikian pelaksanaan sistem ekonomi disebuah negara dapat berjalan dengan lancar apabila lingkungan masyarakatnya mendukung penuh pelaksanaan sistem ekonomi tersebut. Didunia sendiri sistem ekonominya yang ada dapat dibagi menjadi tiga yang biasa di anut atau diterapkan yaitu:

1. Pertama sistem ekonomi kapitalis yaitu semua hal yang mengenai perekonomian yang diserahkan kepada pasar.
2. Kedua, sistem ekonomi komunis yaitu semua hal diatur oleh pemerintah.
3. Ketiga yaitu sistem ekonomi campuran yang merupakan gabungan dari dua sistem ekonomi diatas (kapitalis dan komunis).

Namun demikian banyak negara yang menganut sistem ekonomi tersebut tidak sepenuhnya di terapkan secara murni. Semua itu tergantung bagaimana suatu negara menerapkan dan menjalankan sistem perekonomian di suatu negaranya secara nyata, agar dapat mensejahterakan perekonomian di negara tersebut.

Jadi untuk menjawab pertanyaan tentang konsep atau sistem ekonomi apakah yang sesuai dengan indonesia yaitu, menurut saya sistem ekonomi yang sesuai dengan indonesia adalah sistem ekonomi campuran. Alasannya yaitu pertama, indonesia merupakan negara yang masih berkembang, dimana sering terjadi kegagalan pasar yang disebabkan oleh kurang meratanya informasi atau aksesibilitas terhadap sarana transportasi dan komunikasi. Kedua yaitu masih banyak masyarakat indonesia berada dibawah garis kemiskinan. Ketiga kebanyakan masyarakat indonesia memiliki usaha yang masih tergolong kedalam (usaha kecil menengah) yang masih belum bisa bersaing secara sempurna dengan usaha yang lebih besar.

Selain itu dalam sistem ekonomi campuran juga dibutuhkan peran pemertintah dalam mengawasi perkembangan perekonomian yang berjalan di negara indonesia, agar tercipta kesejahteraan didalam kehidupan masyarakat. Dan pemerintah juga harus bisa adil dan teliti dalam menindak para pelaku kegiatan ekonomi yang berbuat curang serta kurang bertanggung jawab agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Jadi sistem ekonomi campuran disini merupakan suatu sistem ekonomi dimana di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, tetapi di sisi lain pemerintah ikut campur tangan dalam perekonomian yang bertujuan untuk menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.

Jadi untuk menerapkan sistem ekonomi campuran maka harus diterapkan secara nyata di lingkungan masyarakat agar sistem perekonomian di suatu negara tersebut menjadi lancar, seimbang, dan membuat lebih sejahtera bagi semua pihak yang terlibat.

2

PERMASALAHAN JANGKA PENDEK EKONOMI INDONESIA

Latar belakang masalah utama yang muncul dalam sistem keuangan dan perbankan Indonesia, tentu saja, adalah penurunan cepat nilai tukar di negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand, Korea Selatan dan Malaysia sejak pertengahan 1997. Tren ini diperburuk dengan berlanjutnya pertumbuhan lamban di Jepang. Peristiwa ini telah menjadi terkenal di media Australia di bawah label seperti 'krisis ekonomi Asia' atau 'krisis keuangan Asia'. Namun, deskripsi semacam itu cukup menyesatkan, karena krisis sama sekali tidak memengaruhi seluruh Asia (Cina, Taiwan, dan India telah lolos dari masalah serius) dan pengaruhnya sangat bervariasi di seluruh kawasan. Sementara mayoritas komentator menganggap bahwa sebagian besar negara yang terkena dampak akan kembali ke kesehatan ekonomi dalam satu atau dua tahun, ada jauh lebih sedikit optimisme tentang Indonesia karena kelemahan politik negara berarti bahwa Jakarta belum mengembangkan respon kebijakan yang efektif. Prospek gejolak politik pasti akan merusak kepercayaan investor asing di Indonesia, menghalangi masuknya modal asing penting untuk mengembalikan nilai mata uang Indonesia, rupiah, dan untuk memulai kembali pertumbuhan ekonomi.

Rupiah Indonesia pada awalnya tidak terpengaruh oleh tekanan pada mata uang regional lainnya pada awal 1997 karena tampaknya tidak mengalami masalah akut berupa defisit neraca berjalan yang besar dan utang luar negeri dalam mata uang dolar yang tinggi. Selama beberapa tahun bank sentral Indonesia (Bank Indonesia) juga membiarkan rupiah mengambang dalam kisaran 8 persen, memungkinkan depresiasi tahunan 4-5 persen dari tahun 1995. Ketika mata uang Thailand, Malaysia dan Filipina mulai melemah di awal Juli 1997, Bank Indonesia mengambil langkah pre-emptive untuk meningkatkan band di mana rupiah bisa mengambang dari 8 persen menjadi 12 persen. Namun, pada awal Agustus, rupiah tampaknya telah menangkap 'penularan' dan jatuh di bawah pita 12 persen. Bank Indonesia dipaksa untuk membiarkan mata uang mengambang bebas dan pada akhir Oktober telah jatuh dari tingkat Juni 1997 sekitar 2.400 ke dolar ke level terendah baru 3600 ke dolar. Penurunan tajam rupiah, mulai Juli-Agustus 1997, segera mengungkapkan kelemahan mendasar dari sektor keuangan Indonesia. Penjualan panik rupiah ke dolar oleh perusahaan-perusahaan Indonesia dengan utang dalam denominasi dolar menunjukkan bahwa utang luar negeri swasta

jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan sebelumnya. Lebih buruk lagi, fakta bahwa Bank Indonesia tidak mengetahui tingkat hutang menunjukkan kemampuannya yang buruk untuk mengawasi dan mengatur pasar keuangan Indonesia. Seperti halnya di Thailand, sebagian besar hutang luar negeri bersifat jangka pendek dan akan dibayarkan dalam waktu dua belas bulan dan, dengan terus turunnya nilai tukar rupiah, semakin sulit untuk diperbaiki.

Dampaknya pada banyak bank cepat dan berbahaya. Pemerintah melikuidasi 16 bank domestik swasta pada bulan November. Kurangnya kepercayaan di sektor perbankan ditunjukkan secara dramatis akhir bulan itu ketika desas-desus tentang kematian pemegang saham utama bank swasta terbesar di Indonesia, Bank Central Asia, hampir memicu pelarian pada Bank. Sementara itu, rupiah terus berlanjut. jauh melampaui semua prediksi. Pada awal Januari 1998, mata uang Indonesia anjlok hingga 10.000 ke dolar, devaluasi 75 persen sejak pertengahan 1997. Pada akhir Januari, rupiah jatuh ke titik terendahnya dari 17.000 terhadap dolar dan telah diperdagangkan dalam kisaran 9.000 hingga 10.000 sejak saat itu. Ini juga disertai dengan kemerosotan yang mendalam di pasar saham, dengan indeks jatuh dari 720 pada Juli menjadi 600 pada Agustus dan jatuh total 75 persen pada pertengahan Desember.

Efek paling cepat dan meluas dari krisis ekonomi terhadap masyarakat Indonesia adalah mempercepat inflasi. Selama paruh pertama 1997, Indonesia mengalami inflasi yang sangat rendah (2,6 persen), tetapi kenaikan harga pada paruh kedua membawa inflasi tahunan untuk 1997 menjadi 11 persen, dibandingkan dengan tingkat 6,5 persen pada tahun 1996. Sejak awal tahun 1998, kenaikan harga telah meningkat lebih jauh ke tingkat yang mengancam hiperinflasi. Inflasi untuk Januari dan Februari 1998 adalah 20 persen dan perkiraan inflasi tahunan untuk tahun mendatang berkisar antara 40-50 persen hingga 100 atau bahkan 200 persen. Harga telah meningkat di sebagian besar sektor, tetapi yang paling parah peningkatan terjadi di bidang-bidang penting seperti makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Harga makanan naik 30 persen selama Januari dan Februari. Selama tahun lalu, beras telah meningkat dari 1800 rupiah per kilo menjadi 3.500 (\$ A0,36 menjadi \$ A0,70 pada nilai tukar April 1998) dan minyak goreng dari 2000 rupiah per liter menjadi 5.500 (\$ A0,40 ke \$ A1). 10). Harga sumber protein seperti telur, kacang kedelai dan ayam meningkat di luar jangkauan banyak konsumen berpenghasilan rendah.

Aspek paling serius dari situasi makanan adalah bahwa masalah yang disebabkan oleh penurunan rupiah terjadi bersamaan dengan Indonesia mengalami kekeringan terburuk selama bertahun-tahun. Produksi beras telah turun 10 persen pada tahun lalu karena efek El-Nio dan ada kemungkinan kuat bahwa kekeringan akan berlanjut hingga tahun ini. Badan distribusi makanan Indonesia, BULOG, akan dipaksa untuk melanjutkan dan meningkatkan impor bahan makanan pokok untuk menjaga harga tetap rendah dan menjaga distribusi makanan. BULOG telah diizinkan untuk membeli valuta asing dengan kurs bersubsidi 5.000 rupiah terhadap dolar, yang pengaruhnya adalah impor makanan disubsidi oleh Bank Sentral dengan mengorbankan posisi valuta asing negara yang sudah lemah. Jika masalah mata uang dan kekeringan terus berlanjut

hingga beberapa bulan mendatang, mempertahankan impor makanan akan menjadi tugas yang semakin sulit.

Ada juga keraguan tentang keefektifan sistem distribusi di banyak daerah, terutama di daerahdaerah timur yang miskin dan terpencil di negara tersebut yang secara khusus dipengaruhi oleh kekeringan. Kekurangan telah diperburuk di beberapa kabupaten dengan menimbun dan membeli panik. Namun demikian, situasi pangan di Indonesia belum mencapai apa pun yang mendekati proporsi bencana. Stok langsung sudah mencukupi dan BULOG pada umumnya terbukti efektif sebagai agen impor dan distribusi makanan di masa lalu. Kekhawatiran akan meningkat pada paruh kedua tahun 1998, terutama jika hujannya buruk.

Runtuhnya mata uang Indonesia dan paparan sektor swasta akibat hutang luar negeri yang besar dan tidak dapat dibayar kembali telah berdampak buruk pada lapangan kerja, terutama di daerah perkotaan. Angka akurat mengenai tingkat kehilangan pekerjaan tidak mungkin diperoleh, tetapi sebagian besar perkiraan memperkirakan angka itu sekitar dua juta.

Industri yang merasakan dampak paling langsung adalah konstruksi (di mana satu juta pekerja diperkirakan diberhentikan) karena banyak pinjaman luar negeri jangka pendek diarahkan ke proyek pembangunan kota dan infrastruktur. Ada juga PHK yang luas di bidang manufaktur dan di sektor perbankan dan jasa karena kekhawatiran manufaktur baru yang sangat berpengaruh telah bangkrut. Sektor perbankan telah benar-benar runtuh dan industri yang menyediakan layanan untuk industri baru dan konsumen telah kehilangan pelanggan mereka. Indonesia telah mengalami pertumbuhan lapangan kerja yang kuat selama beberapa tahun terakhir, tetapi merupakan pekerjaan di bidang pertumbuhan baru yang paling rentan terhadap perubahan keadaan ekonomi.

Sering diasumsikan bahwa pekerja berupah di negara berkembang dapat kembali ke desa mereka jika mereka kehilangan pekerjaan di kota dan, memang, ini sering terjadi di masa lalu ketika sektor upah tenaga kerja sangat kecil. Tetapi transformasi ekonomi Indonesia dalam dua dekade terakhir berarti bahwa daerah pedesaan tidak dapat lagi berfungsi sebagai 'penyerap guncangan' untuk pengangguran. Hal ini terutama berlaku di pulau Jawa yang paling padat penduduknya di mana mayoritas tenaga kerja sekarang bekerja di industri dan jasa sekunder, dengan minoritas masih bekerja di pertanian. Dengan diperkenalkannya teknik dan teknologi pertanian baru, produktivitas pertanian telah meningkat pesat, tetapi pertanian modern sering mempekerjakan lebih sedikit orang daripada metode tradisional. Dalam hal apa pun, peningkatan produktivitas telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan sudah ada sejumlah besar orang yang menganggur (bekerja hanya beberapa jam sehari atau beberapa bulan setiap tahun) di daerah pedesaan. Pada saat-saat terbaik tidak ada prospek bagi pekerja yang kembali ke desa, dalam kekeringan hari ini tidak ada yang ditawarkan selain kelaparan. Sebagian besar pekerja kota yang menganggur dipaksa untuk mencari eksistensi di sektor informal (menjajakan kaki dll), bergantung pada dukungan keluarga atau mencari pekerjaan di kota-kota regional. Kurangnya

sistem negara untuk dukungan sosial berarti bahwa statistik resmi sangat meremehkan masalah tersebut, tetapi bahkan ini menghitung pengangguran dan setengah menganggur dalam dua bulan terakhir menjadi masing-masing 8,7 juta dan 18,4 juta, angka yang mewakili lebih dari 30 persen dari tenaga kerja.

Sebagian besar pekerja industri bekerja dengan upah rendah dalam kondisi yang buruk, tetapi dalam kebanyakan kasus pekerjaan kota mewakili peningkatan standar hidup di semi-lapangan kerja di pedesaan, terutama dengan kenaikan tingkat upah yang stabil selama beberapa tahun terakhir. Namun hari ini, kehilangan pekerjaan, turunnya upah dan meningkatnya harga komoditas penting telah membuat banyak pekerja kota kembali ke perjuangan untuk keberadaan dasar. Bagi jutaan orang yang ditarik ke pekerjaan di sektor ekonomi modern dalam beberapa tahun terakhir, krisis telah memangkas janji untuk dibebaskan dari kemiskinan yang telah mengatur kehidupan keluarga mereka selama beberapa generasi.

Di daerah pedesaan, kekeringan, kekurangan beras dan kenaikan harga juga membawa kembali ke kemiskinan yang serius dan meluas. Perkiraan Bank Dunia menunjukkan bahwa jumlah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan akan meningkat dari 23 juta menjadi 40 juta. Kerusakan layanan seperti angkutan umum (karena kenaikan harga bahan bakar dan kekurangan suku cadang impor) telah mempengaruhi perkotaan dan daerah pedesaan sama. Bagi karyawan kelas menengah dan pekerja bergaji, krisis telah tiba-tiba mengakhiri kemakmuran relatif yang mulai mereka terima sebagai hal biasa. Banyak pengusaha kecil telah bangkrut atau dihadapkan dengan penurunan drastis dalam bisnis dan karyawan yang digaji telah kehilangan pekerjaan atau gaji mereka yang sering diperbaiki terkikis oleh inflasi. Kelompok-kelompok ini juga merupakan konsumen terbesar barang dan jasa impor dan barang publik seperti transportasi, listrik, pendidikan dan layanan kesehatan, yang semuanya menjadi jauh lebih mahal setelah krisis.

Dampak dari krisis ekonomi di Indonesia jelas telah dirasakan secara berbeda oleh berbagai bagian masyarakat Indonesia. Tetapi dampak umum dari krisis ini adalah hancurnya apa yang tampaknya bagi kebanyakan orang Indonesia adalah janji untuk meningkatkan kesejahteraan. Meskipun terjadi sejumlah kemunduran pada tahun 1970-an dan 1980-an, yang sebagian besar berasal dari masalah di industri minyak yang penting, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di bawah Orde Baru, dengan rata-rata sekitar 7 persen pertumbuhan tahunan dalam dekade terakhir. Pertumbuhan ini menciptakan peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi banyak orang Indonesia, dengan prospek peningkatan yang berkelanjutan. Krisis ekonomi, dengan inflasi, kelangkaan pangan, kebangkrutan yang meluas dan hilangnya lapangan kerja, telah mengancam untuk mengakhiri kemakmuran beberapa orang Indonesia yang baru-baru ini diperoleh atau membawa kembali ke kemiskinan untuk lebih banyak lagi. Krisis ini merupakan pukulan psikologis terhadap kepercayaan bahwa Indonesia akhirnya telah mengatasi sejarah panjang ketidakstabilan ekonomi dan politiknya dan berada di jalur jangka panjang menuju kemakmuran.

Krisis ekonomi dan politik di Indonesia berawal di luar negeri dan pada awalnya tampaknya tidak menghadirkan kesulitan besar bagi negara yang manajemen makroekonominya pada umumnya dianggap sehat. Namun, ketika ketidakpastian tentang banyak mata uang Asia mulai memengaruhi Indonesia, masalah struktural utama di sektor keuangan negara dan tingkat utang luar negeri swasta yang nyata menjadi jelas dan membawa rupiah ke tingkat yang jauh di bawah mata uang lain yang jatuh di kawasan ini. . Meskipun nilai tukar saat ini secara umum dianggap sangat membesar-besarkan masalah riil ekonomi Indonesia, rupiah belum pulih karena respons Pemerintah terhadap krisis hanya akan merusak kepercayaan internasional terhadap mata uang tersebut. Kurangnya kepercayaan diri juga mencerminkan kekhawatiran yang mendalam tentang masa depan politik Indonesia, dengan Presiden yang sudah lanjut usia yang bersikeras mempertahankan kekuasaan dan menghambat perubahan politik bahkan ketika ia tampaknya semakin tidak bersentuhan dengan realitas ekonomi internasional dan dengan perasaan banyak orang. orang sendiri.

Pada saat penulisan ini, tampak bahwa Pemerintah Indonesia dan IMF beringsut menuju sebuah perjanjian yang akan memungkinkan dimulainya kembali aliran bantuan keuangan penting bagi perekonomian Indonesia. Tanpa bantuan itu, Indonesia tidak mungkin dapat menstabilkan mata uangnya, yang penting sebagai langkah pertama untuk memulihkan kelangsungan sektor keuangannya dan mengembalikan perusahaan-perusahaan Indonesia ke solvabilitas. Hanya dengan demikian Indonesia dapat mengambil keuntungan dari peluang yang ditawarkan oleh mata uang yang terdevaluasi tetapi stabil dalam hal peningkatan daya saing ekspor dan daya tarik bagi investor asing.

Sementara itu, efek sosial dari krisis terus menggigit standar hidup rakyat Indonesia, dengan jutaan orang kehilangan pekerjaan dan setiap orang Indonesia yang menderita akibat meningkatnya biaya barang-barang kebutuhan pokok. Perkiraan jumlah orang yang terlempar kembali ke bawah garis kemiskinan merupakan pembalikan tragis dari kemajuan stabil yang telah dibuat Indonesia selama beberapa dekade terakhir dalam membebaskan rakyatnya dari generasi kemiskinan. Dampak memburuknya krisis terhadap kehidupan sehari-hari orang Indonesia biasa mengancam untuk membawa ketidakpuasan politik yang sudah tumbuh di antara banyak orang ke tempat terbuka, apa pun ketakutan mereka tentang represi Angkatan Darat.

Orde Baru telah berlaku selama tiga puluh tahun karena membawa kemakmuran bagi sebagian besar orang Indonesia, sementara mengandalkan ABRI untuk menekan suara-suara perbedaan pendapat. Dengan melakukan hal itu, hal itu meningkatkan harapan dan menumbuhkan kebencian karena pembangunan ekonomi disandingkan dengan liberalisasi politik. Krisis saat ini telah menghancurkan harapan dan memunculkan ketidakpuasan bawah tanah yang telah lama dirasakan tentang favoritisme terang-terangan Presiden Soeharto dan penolakannya untuk membiarkan kritik atau protes publik. Transformasi masyarakat Indonesia yang dibawa oleh Orde Baru telah menciptakan pemain-pemain potensial baru yang berteriak-teriak untuk mengatakan

tentang realitas politik baru Indonesia. Ada juga jutaan orang yang menganggur dan menganggur di kota-kota besar di Indonesia. Meskipun tidak ada individu atau gerakan yang jelas untuk memimpin mereka hari ini, tidak terbayangkan bahwa mereka dapat bergabung dengan gerakan massa yang, seperti di Filipina pada tahun 1986 atau di Iran pada tahun 1979, menurunkan tatanan pemerintahan. Dengan apa yang disampaikan diatas bahwa masa krisis yang terjadi di Indonesia tahun 1997 sangat menjadi pelajaran bagi rakyat Indonesia.

Beberapa cara mengatasi masalah ekonomi di Indonesia :

1. Presiden mengajak semua pihak dalam menghadapi krisis global harus terus memupuk rasa optimisme dan saling bekerjasama sehingga bisa tetap menjaga kepercayaan masyarakat.
2. Pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen harus terus dipertahankan antara lain dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik.
3. Ketiga adalah optimalisasi APBN 2012 untuk terus memacu pertumbuhan dengan tetap memperhatikan `social safety net` dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan yaitu infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan dan BBM. Untuk itu perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran APBN maupun APBD khususnya untuk peruntukan konsumtif.
4. Ajakan pada kalangan dunia usaha untuk tetap mendorong sektor riil dapat bergerak. Bila itu dapat dilakukan maka pajak dan penerimaan negara bisa terjaga dan juga tenaga kerja dapat terjaga. Sementara Bank Indonesia dan perbankan nasional harus membangun sistem agar kredit bisa mendorong sektor riil. Di samping itu, masih menurut Kepala Negara, pemerintah akan menjalankan kewajibannya untuk memberikan insentif dan kemudahan secara proporsional.
5. Semua pihak lebih kreatif menangkap peluang di masa krisis antara lain dengan mengembangkan pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS.
6. Menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat.
7. Perlunya penguatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan serta sektor swasta.
8. Semua kalangan diharapkan untuk menghindari sikap ego-sentris dan memandang remeh masalah yang dihadapi.
9. Presiden meminta semua pihak melakukan komunikasi yang tepat dan baik pada masyarakat. Tak hanya pemerintah dan kalangan pengusaha, serta perbankan, Kepala Negara juga memandang peran pers dalam hal ini sangat penting karena memiliki akses informasi pada masyarakat.

Secara umum, ilmu ekonomi berguna karena ia memberikan petunjuk-petunjuk mengenai kebijaksanaan apa yang bisa diambil untuk menanggulangi suatu permasalahan ekonomi tertentu. Ekonomi makro, sebagai satu cabang dan ilmu ekonomi, berkaitan dengan permasalahan kebijaksanaan tertentu, yaitu permasalahan kebijaksanaan makro. Tugas pengendalian makro adalah juga mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dan keadaan-keadaan yang bisa mengganggu keseimbangan umum tadi. Pengelolaan yang lebih khusus atas masing-masing sektor perekonomian bukan bagian dan tugas pengendalian makro, meskipun menjaga keseimbangan antara masing-masing sektor termasuk di dalam tugas tersebut.

Permasalahan Ekonomi Makro Jangka Pendek yang dihadapi Indonesia :

Masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana “menyetir” perekonomian nasional dan bulan ke bulan, dan triwulan ke triwulan atau dan tahun ke tahun, agar terhindar dan tiga “penyakit makro” utama yaitu:

A. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak dialami oleh hampir semua negara. Yang dimaksud dengan inflasi adalah suatu keadaan kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Oleh sebab itu, kondisi semacam itu dianggap sebagai masalah dan tidak diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Walaupun tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, inflasi tetap merupakan masalah, karena dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat, dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi, dan dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan kerja dalam masyarakat.

Tingkat Keparahan

Inflasi Ringan berada dibawah 10% per tahun

Inflasi Sedang berada 10% - 30% per tahun

Inflasi Berat berada 30% - 100% per tahun

Penyebab Inflasi

1. Demand Pull Inflation. Inflasi ini disebabkan kelebihan permintaan atas barang / jasa dan sering disebut sebagai inflasi sisi permintaan.
2. Cost-Push Inflation. Kenaikan biaya produksi

Penyebab Inflasi

1. Jumlah Uang Yang Beredar Dimasyarakat
2. Administered Prices adalah harga barang dan jasa tertentu yang tingkat harganya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau BUMN
3. Supply shock misalnya kekeringan, wabah ternak, gagal panen, harga minyak dunia dll

Cara Mengendalikan Inflasi

1. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang berasal dari bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen –instrumen yang dimiliki bank sentral.
2. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah dengan mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah.
3. Kebijakan lainya diantaranya : peningkatan Produksi, kebijakan upah, pengawasan harga.

B. Pengangguran

Pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Berdasarkan tingkat pengangguran, dapat diketahui apakah perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (full employment) atau tidak. Secara teoretis perekonomian dianggap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh apabila tenaga kerja yang tersedia seluruhnya digunakan. Di negara kita upaya untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana merupakan salah satu alternatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi tidak mempunyai arti jika dibarengi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi.

C. Ketimpangan dalam neraca pembayaran.

Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, dan biasanya satu tahun. Transaksi-transaksi yang terdapat dalam neraca pembayaran menyangkut barang-barang dan jasa, dalam bentuk ekspor atau impor, transaksi finansial, seperti pemberian atau penerimaan kredit kepada atau dari negara lain, penanaman modal di luar negeri dan transaksi-transaksi yang bersifat unilateral, seperti pembayaran transfer dari orang-orang yang tinggal di luar negeri. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran suatu negara dapat dikatakan merupakan masalah apabila ketidakseimbangan tersebut cukup besar. Jika kenyataan itu terjadi, diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasinya. Dalam jangka panjang permasalahan ekonomi makro menyangkut persoalan pertumbuhan di bidang ekonomi. Masalah ini pada dasarnya menyangkut bagaimana mengatur perekonomian agar terdapat keserasian antara pertumbuhan penduduk, penambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi.

3

KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH INDONESIA

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah melewati tahun keempat, yang menjadi tahun krusial masa kepemimpinannya. Kebijakan dan program pemerintahan Jokowi sepanjang tahun keempat tak pernah lepas dari sorotan media nasional dan internasional. Indonesia Indicator (I2) mencatat, sepanjang 1 Oktober 2017-30 September 2018, pemberitaan mengenai Jokowi di 1.638 media daring Indonesia mencapai 576.796 berita. Selain itu, pemberitaan Jokowi pada 175 media daring internasional mencapai 3.855 berita. "Tahun keempat pemerintahan Jokowi menjadi tahun yang krusial, karena mendekati akhir masa jabatan lima tahun," ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang dalam rilisnya, Senin (8/10/2018). Baca juga: Unggul di Survei, Tim Jokowi-Maruf Amin Tak Mau Terlenu " Media menjadi pihak aktif yang selalu membingkai berbagai kebijakan, program, serta kejadian terkait pemerintahan Jokowi dari berbagai sudut pandang," tambahnya. Menurut Rustika, di tahun keempat kepemimpinan Jokowi, isu-isu dan kebijakan yang terkait Politik dan Keamanan (Polkam) serta ekonomi menjadi bahasan paling banyak disorot media. Politik dan Keamanan Total pemberitaan tentang Jokowi pada isu Polkam mencapai 181.820 berita atau 41 persen. Sedangkan pemberitaan Jokowi dalam bidang Ekonomi sebesar 33 persen atau mencapai 144.279 berita. "Pada riset 2015 dan 2016, di dua tahun pertama pemerintahan Jokowi, media memiliki kecenderungan mengangkat agenda berita tentang perekonomian dibanding berita politik. Hal ini berubah di 2017-2018, pemberitaan media online lebih banyak berkaitan dengan isu politik dan keamanan," ungkap Rustika. Pemberitaan mengenai Jokowi dalam bidang Polkam, sambung dia, tak bisa dilepaskan dari gelaran kontestasi politik Pilkada serentak 2018. "Dominasi pemberitaan mengenai Jokowi dalam bidang politik dan keamanan cukup signifikan menjelang Pilkada Serentak," tuturnya. Peningkatan ekspos media terhadap Jokowi terpantau mulai Maret 2018. Menurut Rustika, fenomena cukup menarik terjadi jelang hari pencoblosan Pilkada serentak pada Juni 2018. Baca juga: Survei SMRC: 73,4 Persen Responden Puas Kinerja Jokowi, 71,4 Yakin dengan Kepemimpinannya Pilpres menjadi isu terbesar Jokowi dalam bidang polkam, bahkan eksposnya lebih tinggi dibanding pilkada dengan segala variannya. "Pilkada serentak dipakai sebagai pemanasan partai politik jelang Pemilu 2019," ungkap Rustika. Isu terbesar berikutnya dalam bidang polkam adalah pilkada (106.475 berita), aksi terorisme (16.156 berita) serta aksi GantiPresiden (8192 berita). Dalam konteks penanganan aksi terorisme, langkah Pemerintahan Jokowi dinilai sigap dengan mengerahkan kekuatan pertahanan keamanan dalam pemberantasan terorisme yang diawali dengan pengesahan UU Terorisme. Sementara itu, media juga memberikan perhatian pada intensitas aksi yang menuai kontroversi pada gerakan Ganti Presiden

yang meningkat sejak April 2018. Isu Ekonomi Dalam bidang ekonomi, isu terbesar yang ditujukan pada Jokowi adalah infrastruktur, ekspor impor, koperasi, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Isu infrastruktur, masih menjadi program andalan Presiden Jokowi untuk merangsang percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Proyek pembangunan bandara, waduk, kereta api, pembangkit listrik, dan jalan tol menjadi varian proyek yang paling mendapat sorotan media yakni mencapai 25.297 berita. "Meskipun sarat keberhasilan, penambahan anggaran infrastruktur di APBN 2018 kerap dinarasikan sebagai langkah politis Jokowi," papar Rustika. Baca juga: Di Hadapan Jokowi, Said Aqil Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kepemimpinan Jokowi, lanjut dia, berhasil meramu sektor pariwisata menjadi primadona baru perekonomian negara. Industri pariwisata berhasil menyumbang devisa negara terbesar kedua di tahun 2017 dan mampu mengundang minat investasi yang tinggi. Pemberitaan terkait keberhasilan Jokowi dalam pariwisata mencapai 11.247 berita. Keberhasilan pemerintah Jokowi merebut Blok Mahakam, Blok Rokan, dan Divestasi Freeport dinilai media merupakan bentuk komitmen Jokowi untuk berdikari dalam sektor pengelolaan kekayaan negara juga menjadi sisi positif yang diangkat media. Berdasarkan studi I2, catatan merah dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi muncul dari sektor ekspor-impor yang kerap menuai kontroversi. Secara khusus, perhatian terpusat pada kebijakan impor beras dan impor garam yang dinilai kurang berpihak pada golongan petani. Dalam isu ini, Jokowi diberitakan sebanyak 22.082 berita. Demikian juga dalam stabilitas Rupiah. Baca juga: Jokowi Minta Asian Para Games Sukses Asian Games 2018 Dalam bidang Sosial, Asian Games merupakan event yang paling besar menyedot perhatian media tahun 2018. Ada tiga isu utama yang mendapat perhatian media, yakni pembangunan infrastruktur untuk pelaksanaan Asian Games, meriahnya penyelenggaraan Asian Games, hingga raihan medali Indonesia di Asian Games. Pemberitaan media terkait Jokowi dalam isu Asian Games mencapai 33.325 berita. Program Sertifikasi Tanah juga mendapatkan perhatian media terkait rencana pemerintah menargetkan membagikan 350 ribu bidang lahan pada tahun 2018. Media juga memberitakan program sertifikasi ini kerap terhambat karena koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Total pemberitaannya mencapai 15.628 berita. Selain itu, bencana alam mengalami kenaikan ekspos yang pesat pada Agustus 2018 karena gempa Lombok, Bali, Palu dan Donggala yang mencapai 15.628 berita. Media banyak menyoroti upaya penanganan bencana (distribusi bantuan dan pemulihan daerah), hingga polemik status bencana nasional yang menjadi perdebatan elite politik. Sementara dalam bidang hukum, masalah pemberantasan korupsi, narkoba serta UU Ormas adalah isu terbesar yang ditujukan pada Jokowi. Angin Segar Presiden Jokowi juga disoroti media daring internasional dalam 4.032 berita. Menurut Rustika, pemberitaan Jokowi di media daring internasional menurun 28 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu 5.627 berita. "Namun, penurunan ini berarti positif, mengingat pemberitaan pada periode sebelumnya lebih banyak menyoroti hal-hal negatif seperti kebijakan hukuman mati bagi WNA pengedar narkoba dan

kasus penistaan agama khususnya kasus Ahok," kata Rustika. Asian Games merupakan event olahraga internasional yang mampu sedikit mendinginkan suasana yang hangat di tahun politik ini. Pagelaran olahraga di bulan Agustus tersebut, yang juga bersamaan dengan deklarasi capres-cawapres, membuat perhatian media cukup cair. Sebanyak 33.645 berita tentang Asian Games terkait Jokowi di media nasional, sebanyak 402 berita di media asing berbahasa Inggris, bahkan sedikit lebih besar dibandingkan berita internasional tentang bom Surabaya (389 berita). "Asian Games mampu menjadi jeda dan pendingin dalam hangatnya tahun politik kali ini. Dari media nasional, internasional, bahkan media sosial twitter tentang Jokowi soal Asian Games memberikan persepsi yang positif," ucapnya. "Asian Games tidak hanya mendorong semangat nasionalisme, di sisi lain juga mampu mengimbangi, bahkan meredam hatespeech terhadap Jokowi di twitter di Agustus," ungkap Rustika. Media Internasional Di media internasional, bulan penyelenggaraan Asian Games 2018 menjadi puncak pemberitaan positif terkait Presiden Jokowi. Media internasional mengaitkan kesuksesan Asian Games sebagai alat pendongkrak popularitas Presiden Jokowi untuk Pemilihan Presiden 2019. Isu Pilpres menjadi isu positif teratas Presiden Jokowi, dengan jumlah pemberitaan stabil hingga meningkat di pada masa deklarasi calon wakil presiden, Agustus 2018. Sementara itu, isu negatif yang disoroti media online internasional adalah bom di Surabaya. Isu ini tidak hanya menaruh perhatian media terkait terorisme, tetapi juga menyangkut maraknya intoleransi. Kunjungan Presiden Jokowi ke wilayah terdampak bencana alam juga mendapatkan sorotan media internasional. Peningkatan isu bencana alam Indonesia terjadi tiga bulan terakhir, diawali dengan gempa bumi Lombok pada bulan akhir Juli 2018 dan gempa bumi serta tsunami di wilayah Sulawesi Tengah pada akhir bulan September 2018.

Ada keraguan apakah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Indonesia dapat mencapai 5,2 persen tahun-ke-tahun (y / y) pada tahun penuh 2018 karena Indonesia sedang mengalami beberapa tantangan besar. Tantangan termasuk perang perdagangan global, rupiah yang rapuh, suku bunga acuan Bank Indonesia yang lebih tinggi, defisit transaksi berjalan, dan ketegangan politik menjelang pemilihan legislatif dan presiden 2019. Saat ini, perkiraan Investasi Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ditetapkan sebesar 5,2 persen (y / y) pada tahun 2018. Pada hari Jumat (06/07) perang perdagangan global dimulai ketika AS mengenakan tarif impor barang-barang Tiongkok senilai \$ 34 miliar. Cina berjanji untuk membalas. Tetapi langkah ini tentu akan bertemu dengan tarif impor baru AS, sehingga meningkatkan masalah lebih lanjut. Perang perdagangan menimbulkan kekhawatiran tentang pertumbuhan ekonomi global serta dampak dari tarif impor pada rantai pasokan global.

Sementara itu, AS mengatakan sedang meninjau 124 produk Indonesia yang dikirim ke AS. Barang-barang ini juga dapat dikenakan tarif impor dan dapat memicu tindakan balasan dari Kementerian Perdagangan Indonesia; situasi yang akan berdampak buruk bagi kedua negara. Jika

pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan China dirusak oleh perang perdagangan, maka itu akan berdampak langsung pada ekspor Indonesia dan - lebih umum - berdampak pada ekonomi Indonesia karena Cina dan AS sama-sama di antara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Sementara itu, bahan baku dan komoditas yang dipasok oleh Indonesia ke China (untuk membuat produk-produk yang sekarang menjadi tarif impor AS) kemungkinan akan terpengaruh karena permintaan bahan baku / komoditas ini diperkirakan akan turun.

Kedua, Indonesia termasuk di antara kelompok pasar berkembang Asia terpilih yang didera oleh defisit transaksi berjalan yang luas (bersama dengan India dan Filipina), terutama karena selera negara-negara ini untuk impor minyak mentah. Defisit ini merusak kepercayaan investor terhadap aset Indonesia dan karenanya memberikan tekanan pada rupiah karena Indonesia telah menjadi tergantung pada arus eksternal untuk membiayai defisit eksternal (yang juga menentukan stabilitas rupiah Indonesia).

Defisit transaksi berjalan Indonesia tercatat sebesar \$ AS5,5 miliar, setara dengan 2,15 persen dari PDB nasional, pada kuartal pertama tahun 2018. Ini adalah peningkatan tajam dibandingkan dengan Triwulan ke-1/17 ketika defisit dicatat pada USD \$ 2,4 miliar (atau 1,0 persen dari PDB). Dengan demikian, defisit transaksi berjalan Indonesia lebih dari dua kali lipat, suatu perkembangan yang terutama disebabkan oleh impor yang meningkat pesat. Sementara itu, defisit 2018 setahun penuh bisa jatuh antara 2,1 - 2,5 persen dari PDB. Karena itu Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berencana untuk meninjau impor barang modal untuk proyek-proyek pemerintah besar dalam upaya untuk mengurangi defisit neraca berjalan negara. Dilaporkan bahwa dalam lima bulan pertama tahun 2018, Indonesia mengimpor barang senilai \$ AS 4,1 miliar sehubungan dengan proyek pembangunan infrastruktur yang dipimpin pemerintah.

Menyusul tahun volatilitas ekonomi selama tahun 2018, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap lemah pada tahun 2019. Ini sejalan dengan meningkatnya ketegangan politik menjelang pemilihan umum, perang dagang yang sedang berlangsung antara dua mitra dagang terbesar negara itu, Cina dan AS, serta depresiasi Rupiah yang berkepanjangan (Lihat Prospek Ekonomi Indonesia pada 2018: Optimisme Sederhana, Tantangan Tetap Ada). Pemerintah Indonesia perlu menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah eksternal dan internal yang telah menyeret nilai tukar Rupiah ke level terendah sejak krisis keuangan 1998. Karena itu, pemerintah masih optimis bahwa ekonomi Indonesia masih akan tumbuh sebesar 5,3% mengikuti berbagai langkah ekonomi yang sedang dilaksanakan menjelang akhir 2018.

Pemerintah Jokowi memperkirakan bahwa ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh sebesar 5,3% pada tahun 2019. Prediksi ini, yang ditetapkan dalam APBN 2019, lebih rendah dari APBN 2018 sebesar 5,4% tetapi masih lebih tinggi dari perkiraan World Bank sebesar 5,2 %.

Sementara itu, inflasi diperkirakan akan mencapai 3,5% +/- 1% dan nilai tukar Rupiah diasumsikan mencapai rata-rata Rp14.500 per dolar AS, atau jauh lebih tinggi dari pada APBN 2018 Rp13.500 per dolar AS.

Negara ini diperkirakan akan mengalami defisit 1,84% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2019 dengan pendapatan diperkirakan 2,142 triliun rupiah dan pengeluaran 2,439 triliun rupiah, naik dari Rp2,204 triliun pada 2018. Penerimaan pajak diperkirakan mencapai 1,781 triliun Rupiah dibandingkan dengan Rp1609 triliun pada tahun sebelumnya (Lihat Perbankan Pemerintah Indonesia tentang Pengampunan Pajak untuk Menghentikan Kekurangan Pajak). Subsidi energi diperkirakan akan terus memberikan tekanan pada anggaran negara. Hal ini disebabkan oleh kenaikan tingkat konsumsi energi dan harga serta keputusan pemerintah untuk tidak mengubah kebijakan penetapan harga mengingat dampaknya pada daya beli konsumen dan popularitas pemerintah menjelang pemilihan. Pemerintah Indonesia mengalokasikan subsidi energi sebesar 157,79 triliun dalam anggaran negara 2019 atau naik 65% dari 94,6 triliun dalam anggaran negara 2018. Subsidi tersebut terdiri dari IDR 100,69 triliun untuk subsidi bahan bakar dan IDR 57,10 triliun untuk subsidi listrik (Lihat Investasi di Sektor

Kelistrikan Indonesia; Sparks of Life). APBN 2019 menetapkan Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) pada \$ 70 USD per barel, naik dari \$ 48 USD per barel dalam APBN 2018. Produksi minyak diperkirakan akan melanjutkan tren penurunannya dan mencapai 775.000 barel per hari sementara produksi gas akan mencapai 1.250 ribu barel setara minyak per hari, naik dari 1.200 ribu boepd pada tahun sebelumnya (Lihat Tinjauan: Sektor Hilir Minyak dan Gas Indonesia). Di sektor perbankan (Lihat Sektor Perbankan Indonesia; Di Bawah Tekanan

Tapi Tetap Kuat), kenaikan suku bunga repo cadangan Bank Indonesia selama 7 hari (BI7DRR) akan menyebabkan peningkatan suku bunga pinjaman bank pada tahun 2019. Hingga kuartal ketiga 2018, Bank Indonesia (BI) telah meningkatkan suku bunga acuannya sebesar 125 bps menjadi 5,5%. Sebagai akibatnya, bank-bank diharapkan untuk meningkatkan suku bunga pinjaman sebesar 25 - 50 bps. Jika BI selanjutnya meningkatkan suku bunganya menjadi 5,75% pada kuartal terakhir tahun 2018, suku bunga kredit akan naik sebesar 30 bps - 60 bps. Peningkatan tingkat pinjaman keseluruhan akan mencegah pemberi pinjaman potensial sementara pada saat yang sama meningkatkan risiko kredit macet. Pinjaman konsumen, khususnya, berisiko menghadapi peran penting mereka di sektor perbankan Indonesia serta pola konsumerisme.

Diperkirakan bahwa tantangan eksternal dan internal yang dihadapi perekonomian Indonesia pada tahun 2018 akan tetap bertahan selama tahun 2019. Di sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi AS yang kuat dan peningkatan yang stabil dalam tingkat pendanaan Federal Reserve dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong investor untuk menarik modal mereka dari pasar negara berkembang; termasuk Indonesia.

Lebih jauh, perang dagang yang sedang berlangsung antara dua mitra dagang terbesar Indonesia, Cina dan AS, yang berakar dari kebijakan proteksionis Trump telah mulai berdampak pada negara-negara berkembang dan Indonesia belum dibebaskan. Untuk setiap penurunan 1% dalam ekonomi Tiongkok, pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat sebesar 0,11% (Lihat Apa Perlambatan Tiongkok Berarti untuk Indonesia: Perspektif Perdagangan), sementara penurunan yang sama dalam ekonomi AS akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,05% (Lihat Kerentanan & The Fed Indonesia). Sejak Juli 2018, kedua negara telah memberlakukan kenaikan bea masuk atas barang masing-masing senilai \$ 16 miliar dan \$ 34 miliar USD. Selanjutnya, pada bulan September 2018, Trump menampar kenaikan 10% dalam bea impor untuk produk-produk Cina senilai \$ 200 miliar USD yang akan meningkat menjadi 25% pada Januari 2019. Langkah ini dibalas oleh China dengan meningkatkan bea impornya pada produk-produk AS senilai \$ 60 miliar USD Lebih buruk lagi, Cina bukan satu-satunya target kebijakan perdagangan hawkish Trump. Langkah serupa juga diambil oleh pemerintah AS terhadap mitra dagang utama lainnya, termasuk Indonesia, untuk mengekang defisit perdagangannya yang terus meningkat. Turki, Argentina, dan Afrika Selatan adalah di antara negara-negara yang telah menjadi korban proteksionisme Trump. Tiga negara telah menderita depresiasi mata uang dan arus keluar modal yang memaksa bank sentral mereka untuk secara drastis menaikkan suku bunga acuan mereka.

Indonesia masih tetap menjadi target kemarahan AS karena defisit perdagangan sebesar \$ 4,119 miliar USD tetap pada Juni 2018. Administrasi Trump telah mengambil sejumlah langkah untuk mengatasi masalah ini termasuk meninjau kelayakan 124 produk Indonesia yang termasuk dalam sistem preferensi umum (GSP) serta meminta WTO untuk mengenakan denda \$ 350 juta USD sebagai bagian dari kebijakan pembatasan impor terhadap produk-produknya. Beberapa analis memperkirakan bahwa pendapatan ekspor Indonesia dapat turun hingga \$ 11 miliar akibat perang perdagangan yang sedang berlangsung ini (Lihat Pemilihan Presiden AS dan Apa Artinya untuk Indonesia).

Untuk alasan ini, Kementerian Keuangan Indonesia memperingatkan bahwa pertumbuhan PDB negara itu dapat turun lebih jauh lagi menjadi 5,15% jika ketidakpastian ekonomi global berlanjut hingga 2019 dan dengan demikian dapat menghambat lintasan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Risiko ini agak dibendung oleh sikap hawkish Bank Indonesia untuk mencegah depresiasi Rupiah lebih lanjut dan arus keluar modal. Pemerintah Indonesia mengharapkan BI untuk menaikkan kembali suku bunga acuan pada tahun 2019 untuk mengimbangi kenaikan suku bunga dana The Fed.

Karena kenaikan dalam tingkat pendanaan Fed akan menyebabkan arus keluar modal dari negara, langkah ini akan menyebabkan suku bunga bank naik yang dapat menghambat pertumbuhan pinjaman dan menyebabkan lonjakan pinjaman bermasalah yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Defisit Kembar Di sisi internal, perekonomian Indonesia

terganggu oleh defisit kembar, yaitu defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Pada 2017, defisit transaksi berjalan negara itu mencapai \$ 17,3 miliar USD (-1,7% dari PDB). Defisit ini, untungnya, dapat dikompensasi oleh arus masuk modal asing mencapai \$ 29,2 miliar USD. Dengan demikian, negara itu masih mencatat surplus neraca pembayaran sebesar \$ 11,84 miliar USD.

Situasi agak berbeda pada tahun 2018 setelah kenaikan suku bunga pendanaan The Fed, investor sekarang lebih suka menempatkan uang mereka di pasar keuangan AS karena dianggap lebih menarik dan stabil daripada ekonomi negara berkembang. Ini dapat dilihat dari aliran modal asing pada Semester I tahun 2018 yang hanya mencapai \$ 6,5 miliar USD.

Selain itu, defisit transaksi berjalan pada semester pertama tahun 2018 melonjak menjadi \$ 13,7 miliar USD, sehingga neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit sebesar \$ 8,2 miliar USD. Tantangan internal lain yang dihadapi perekonomian Indonesia adalah defisit perdagangan. Pada Agustus 2018, Indonesia mencatat defisit perdagangan sebesar \$ 4,09 miliar USD.

Impor Melonjak Meningkatnya defisit Indonesia disebabkan oleh tingkat impor Indonesia yang meningkat selama dekade terakhir. Impor Indonesia selama Januari hingga Agustus 2018 tumbuh 24,52% menjadi \$ 124,18 miliar USD dari \$ 99,73 miliar USD di tahun sebelumnya. Minyak dan gas merupakan bagian terbesar dari impor Indonesia dengan impor signifikan lainnya adalah mesin dan pesawat mekanik, otomotif, bahan kimia organik, besi, baja dan plastik.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini memberlakukan kenaikan pajak penghasilan hingga 10% pada 1.147 barang konsumsi impor, termasuk kosmetik, furnitur, pakaian, elektronik, otomotif, dan produk makanan, dalam upaya untuk mengekang impor. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 110/2018.

Langkah-langkah lain termasuk menerapkan persyaratan wajib B20 untuk mengurangi impor minyak dan mengharuskan industri untuk meningkatkan penggunaan konten lokal. Ini diharapkan untuk meningkatkan neraca perdagangan negara yang akan mengarah pada permintaan yang lebih rendah untuk dolar AS dan rupiah yang lebih kuat. Namun, langkah-langkah ini dikritik sejak itu. Tantangan tambahan adalah depresiasi Rupiah yang diperkirakan akan melemah hingga pemilihan berikutnya. Dari Januari hingga September 2018, mata uang Indonesia telah menurun lebih dari 10% dari Rp13.345 menjadi hampir Rp15.000 ke dolar AS; level terendah sejak krisis keuangan 1998.

Hal yang sama berlaku untuk sektor pasar modal Indonesia karena Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah jatuh lebih dari 10% pada tahun 2018 dari tertinggi sepanjang masa dari 6.689 pada Februari 2018 menjadi 5.811 pada September 2018.

Bank Indonesia telah reaktif dalam mencoba mencegah depresiasi Rupiah lebih lanjut melalui intervensi aktif di pasar. Akibatnya, cadangan devisa Indonesia turun dari \$ 131,98 miliar USD pada Januari 2018 menjadi \$ 117,8 miliar USD pada September 2018.

Secara keseluruhan, prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2019 agak membingungkan. Dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan rendah mengingat depresiasi Rupiah, arus modal keluar, pelebaran defisit perdagangan dan neraca transaksi berjalan serta dampak dari pemilihan presiden yang menjulang.

Investor biasanya mengadopsi pendekatan tunggu dan lihat menjelang pemilihan presiden Indonesia. Untuk alasan ini, pemerintah Indonesia akan terus bergantung pada investasi domestik dan pengeluaran rumah tangga untuk menggerakkan perekonomian negara pada tahun 2019. Kementerian Sosial telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial sebesar Rp 381 triliun pada tahun 2019, naik 33% dari anggaran negara. tahun sebelumnya sebesar Rp 287 triliun untuk mendorong pengeluaran konsumen agar menjaga aspek penting dari ekonomi ini di jalur yang aman.

4

PENUTUP

Dari apa yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa masalah jangka pendek perekonomian Indonesia telah banyak dilalui sejak krisis moneter tahun 1997. Saat ini Pemerintah maupun seluruh rakyat Indonesia menjadikan hal ini sebagai pembelajaran dan selalu menguapayakan perbaikan perekonomian Indonesia.

Masalah jangka pendek atau masalah stabilisasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana “menyetir” perekonomian nasional dan bulan ke bulan, dan triwulan ke triwulan atau dan tahun ke tahun, agar terhindar dan tiga “penyakit makro” utama yaitu:

A. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak dialami oleh hampir semua negara. Yang dimaksud dengan inflasi adalah suatu keadaan kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Oleh sebab itu, kondisi semacam itu dianggap sebagai masalah dan tidak diperlukan kebijakan khusus untuk mengatasinya. Walaupun tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, inflasi tetap merupakan masalah, karena dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat, dapat menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi, dan dapat menyebabkan perubahan output dan kesempatan kerja dalam masyarakat.

Tingkat Keparahan

Inflasi Ringan berada dibawah 10% per tahun

Inflasi Sedang berada 10% - 30% per tahun Inflasi

Berat berada 30% - 100% per tahun

Penyebab Inflasi

1. Demand Pull Inflation. Inflasi ini disebabkan kelebihan permintaan atas barang / jasa dan sering disebut sebagai inflasi sisi permintaan.
2. Cost-Push Inflation. Kenaikan biaya produksi

Penyebab Inflasi

4. Jumlah Uang Yang Beredar Dimasyarakat
5. Administered Prices adalah harga barang dan jasa tertentu yang tingkat harganya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau BUMN
6. Supply shock misalnya kekeringan, wabah ternak, gagal panen, harga minyak dunia dll

Cara Mengendalikan Inflasi

4. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang berasal dari bank sentral dalam mengatur jumlah uang yang beredar melalui instrumen –instrumen yang dimiliki bank sentral.
5. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berasal dari pemerintah dengan mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah.
6. Kebijakan lainya diantaranya : peningkatan Produksi, kebijakan upah, pengawasan harga.

B. Pengangguran

Pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja atau angkatan kerja melebihi tingkat kesempatan kerja yang tersedia. Berdasarkan tingkat pengangguran, dapat diketahui apakah perekonomian berada pada tingkat kesempatan kerja penuh (full employment) atau tidak. Secara teoretis perekonomian dianggap mencapai tingkat kesempatan kerja penuh apabila tenaga kerja yang tersedia seluruhnya digunakan. Di negara kita upaya untuk menekan tingkat pengangguran dilakukan melalui pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk. Program keluarga berencana merupakan salah satu alternatif untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini disebabkan pembangunan ekonomi tidak mempunyai arti jika dibarengi dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi.

C. Ketimpangan dalam neraca pembayaran.

Neraca pembayaran adalah neraca yang memuat ikhtisar dari segala transaksi yang terjadi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, dan biasanya satu tahun. Transaksi-transaksi yang terdapat dalam neraca pembayaran menyangkut barang-barang dan jasa, dalam bentuk ekspor atau impor, transaksi finansial, seperti pemberian atau penerimaan kredit kepada atau dari negara lain, penanaman modal di luar negeri dan transaksi-transaksi yang bersifat unilateral, seperti pembayaran transfer dari orang-orang yang tinggal di luar negeri. Ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran suatu negara dapat dikatakan merupakan masalah apabila ketidakseimbangan tersebut cukup besar. Jika kenyataan itu terjadi, diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasinya. Dalam jangka panjang permasalahan ekonomi makro menyangkut persoalan pertumbuhan di bidang ekonomi. Masalah ini pada dasarnya menyangkut bagaimana mengatur perekonomian agar terdapat keserasian antara pertumbuhan penduduk, penambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi.

Pada hal kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia saat ini sangat banyak menuai kritik di dalam negeri mengingat kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi dinilai sangat lambat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah melewati tahun keempat, yang menjadi tahun krusial masa kepemimpinannya. Kebijakan dan program pemerintahan Jokowi sepanjang tahun keempat tak pernah lepas dari sorotan media nasional dan internasional. "Tahun

keempat pemerintahan Jokowi menjadi tahun yang krusial, karena mendekati akhir masa jabatan lima tahun. Di dua tahun pertama pemerintahan Jokowi agenda tentang perekonomian lebih banyak dibanding berita politik. Hal ini berubah di 2017-2018, isu pemerintahan Jokowi lebih banyak berkaitan dengan isu politik dan keamanan. Pilkada serentak dipakai sebagai pemanasan partai politik jelang Pemilu 2019. Isu terbesar berikutnya dalam bidang polkam adalah pilkada, aksi terorisme serta aksi GantiPresiden. Dalam konteks penanganan aksi terorisme, langkah Pemerintahan Jokowi dinilai sigap dengan mengerahkan kekuatan pertahanan keamanan dalam pemberantasan terorisme yang diawali dengan pengesahan UU Terorisme. Sementara itu, intensitas aksi yang menuai kontroversi pada gerakan Ganti Presiden yang meningkat sejak April 2018. Isu Ekonomi Dalam bidang ekonomi, isu terbesar yang ditujukan pada Jokowi adalah infrastruktur, ekspor impor, koperasi, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Isu infrastruktur, masih menjadi program andalan Presiden Jokowi untuk merangsang percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Proyek pembangunan bandara, waduk, kereta api, pembangkit listrik, dan jalan tol menjadi varian proyek. Meskipun sarat keberhasilan, penambahan anggaran infrastruktur di APBN 2018 kerap dinarasikan sebagai langkah politis Jokowi. Di Hadapan Jokowi, Said Aqil Kritik Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kepemimpinan Jokowi. Pemerintah Jokowi juga berhasil meramu sektor pariwisata menjadi primadona baru perekonomian negara. Industri pariwisata berhasil menyumbang devisa negara terbesar kedua di tahun 2017 dan mampu mengundang minat investasi yang tinggi. Keberhasilan pemerintah Jokowi merebut Blok Mahakam, Blok Rokan, dan Divestasi Freeport dinilai media merupakan bentuk komitmen Jokowi untuk berdikari dalam sektor pengelolaan kekayaan negara juga menjadi sisi positif yang diangkat media. Berdasarkan studi I2, catatan merah dalam kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi muncul dari sektor ekspor-impor yang kerap menuai kontroversi. Secara khusus, perhatian terpusat pada kebijakan impor beras dan impor garam yang dinilai kurang berpihak pada golongan petani. Demikian juga dalam stabilitas Rupiah. Baca juga: Jokowi Minta Asian Para Games Sukses Asian Games 2018 Dalam bidang Sosial, Asian Games merupakan event yang paling besar menyedot perhatian media tahun 2018. Ada tiga isu utama yang mendapat perhatian media, yakni pembangunan infrastruktur untuk pelaksanaan Asian Games, meriahnya penyelenggaraan Asian Games, hingga raihan medali Indonesia di Asian Games. Program Sertifikasi Tanah juga mendapatkan perhatian media terkait rencana pemerintah menargetkan membagikan 350 ribu bidang lahan pada tahun 2018. Media juga memberitakan program sertifikasi ini kerap terhambat karena koordinasi yang buruk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Media banyak menyoroti upaya penanganan bencana (distribusi bantuan dan pemulihan daerah), hingga polemik status bencana nasional yang menjadi perdebatan elite politik. Sementara dalam bidang hukum, masalah pemberantasan korupsi, narkoba serta UU Ormas adalah isu terbesar yang ditujukan pada Jokowi. Media internasional mengaitkan kesuksesan Asian Games sebagai alat pendongkrak popularitas Presiden Jokowi untuk Pemilihan

Presiden 2019. Isu Pilpres menjadi isu positif teratas Presiden Jokowi, dengan jumlah pemberitaan stabil hingga meningkat di pada masa deklarasi calon wakil presiden, Agustus 2018. Sementara itu, isu negatif yang disoroti media online internasional adalah bom di Surabaya. Isu ini tidak hanya menaruh perhatian media terkait terorisme, tetapi juga menyangkut maraknya intoleransi. Kunjungan Presiden Jokowi ke wilayah terdampak bencana alam juga mendapatkan sorotan media internasional. Peningkatan isu bencana alam Indonesia terjadi tiga bulan terakhir, diawali dengan gempa bumi Lombok pada bulan akhir Juli 2018 dan gempa bumi serta tsunami di wilayah Sulawesi Tengah pada akhir bulan September 2018.

Dalam penanganan permasalahan ekonomi jangka pendek di Indonesia selayaknya memerlukan keseriusan pemerintah Indonesia dikarenakan masalah ini merupakan masalah dengan tenggang waktu yang sangat singkat. Permasalahan jangka pendek ini sangat dirasakan betul oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah dapat membuka seluas luasnya ekonomi kerakyatan dengan membuka pusat pusat sektor ekonomi di seluruh wilayah Indonesia dan mengangkat ekspor Indonesia ke seluruh manca negara. Hal lainnya yang perlu diberikan perhatian khusus adalah sektor pariwisata yang bisa meningkatkan langsung perekonomian di Indonesia. Upaya peningkatan sektor pariwisata ini memerlukan keaktifan pemerintah. Untuk infrastruktur sebaiknya mulai dikurangi karena menyedot biaya investasi yang cukup besar dan tingkat pengembalian yang cukup lama. Perhatian Pemerintah Indonesia sebaiknya mulai diterapkan pada sektor yang dapat mendatangkan devisa langsung kepada negara. Sektor yang paling cepat dan aktif tersebut adalah ekspor dan pariwisata yang dapat menggerakkan roda perekonomian di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.kompasiana.com/tiko20langga/569e4be9379373bb153996c5/masalahmasalahpokok-perekonomian-indonesia>

<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/12/28/183900726/menurut-bi-ini-risiko-jangka-pendek-perekonomian-indonesia>

<http://ikrimatulhusna1.blogspot.com/2013/11/ekonomi-makro-dalam-jangka-pendekdan.html>

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_Archive/CIB/CIB9798/98cib13

http://www.gbgindonesia.com/en/main/why_indonesia/2018/indonesia_s_2019_economic_outlook_challenging_times_amid_political_turbulence_11877.php

<https://regional.kompas.com/read/2018/10/08/09272951/4-tahun-pemerintahan-jokowikebijakan-polkam-dan-ekonomi-paling-disorot?page=all>

<https://www.indonesia-investments.com/id/news/news-columns/economy-of-indonesia-isfacing-several-big-challenges/item8882>

https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia